

## **PERANAN GERAKAN WANITA PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN I TAHUN 1945-1947 DI YOGYAKARTA**

Oleh: Devi Nur Fitria dan Drs. Djumarwan

### **ABSTRAK**

Sejak masa Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang, wanita telah melakukan gerakan dengan tergabung dalam suatu organisasi. Pada tahun 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian diikuti berdirinya organisasi-organisasi wanita. Indonesia belum bisa dikatakan merdeka seutuhnya, karena Jepang belum meninggalkan Indonesia dan kemudian disusul pula oleh pasukan Sekutu. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui situasi Yogyakarta pada awal kemerdekaan dan organisasi wanita apa saja yang berdiri serta peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1947.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa situasi Yogyakarta pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Situasi politik Yogyakarta awal kemerdekaan yaitu pemerintah sedang berusaha melengkapi badan-badan pemerintahan, selain itu perpolitikan di Yogyakarta belum merata karena kurangnya minat wanita untuk bergabung dalam organisasi politik. Keadaan sosial di Yogyakarta pada awal kemerdekaan juga belum kondusif, terjadi perlawanan dengan pihak Jepang yang belum mau meninggalkan Indonesia dan pihak Belanda yang datang kembali. Begitupula dengan keadaan ekonomi yang mana Indonesia belum memiliki mata uang sendiri dan masih menggunakan tiga jenis mata uang yaitu *de Javache Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Perlawanan yang terjadi antara pejuang dan musuh mendorong wanita untuk membentuk organisasi dalam rangka membantu mempertahankan kemerdekaan. Terdapat lima faktor pendorong terbentuknya organisasi wanita baik faktor dari dalam maupun luar. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi terbentuknya sekitar 21 organisasi wanita yang turut serta dalam perjuangan di Yogyakarta. Perjuangan yang dilakukan oleh organisasi wanita dapat digolongkan menjadi dua yaitu perjuangan di garis depan dan perjuangan di garis belakang.

**Kata Kunci:** *Peranan, Wanita, Yogyakarta.*

## **THE ROLE OF THE WOMEN'S MOVEMENT DURING THE FIRST INDEPENDENCE WAR 1945-1947 IN YOGYAKARTA**

By: Devi Nur Fitria and Drs. Djumarwan

### **ABSTRACT**

Since the period of Dutch East Indies and Japanese occupation, women have done the movement by joining in an organization. In 1945 Indonesia proclaimed its independence, followed by the establishment of women's organizations. Indonesia can not be said to be fully independent, because Japan has not left Indonesia and then followed by Allied troops. The purpose of this paper is to know the situation of Yogyakarta in the early of independence and any women's organizations that stood also its role in maintaining the independence of Indonesia in 1945-1947.

The results of this study indicate that the situation of Yogyakarta in the beginning of independence time is still not stable. The political situation of Yogyakarta in the early independence, was the government is trying to complement the government agencies, in addition to politics in Yogyakarta is not evenly distributed due to lack of interest of women to join in political organizations. The social situation in Yogyakarta in the beginning of independence is also not yet conducive, there is resistance with the Japanese side who will not leave Indonesia and the Dutch might come back. So as with the economic circumstances in Indonesia which has no own currency and still use three types of currency de Javache Bank, Dutch East Indies and Japanese government money. The opposition that occurs between fighters and enemies encourages women to form organizations in order to help maintain independence. There are five factors driving the formation of women's organizations both internal and external. These factors affect the formation of approximately 21 women's organizations participating the struggle in Yogyakarta. The struggle made by the women's organization can be classified into two: the struggle at the front and the struggle at the back.

**Keywords:** *Role, Woman, Yogyakarta.*

## A. Pendahuluan

Gerakan wanita dari masa ke masa terus mengalami perkembangan dan memiliki tujuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan masa dan kepentingan dari penguasa. Pada masa pemerintah Hindia Belanda sekolah yang telah ada sebelumnya, hanya diperuntukkan kaum laki-laki sedangkan kaum wanita mendapatkan pendidikan secara tidak formal. Melihat kondisi yang demikian, Kartini menuntut kepada pemerintah Belanda agar mendirikan sekolah bagi kaum wanita. Cita-cita Kartini mulai terealisasi, terbukti dengan berdirinya Sekolah Kartini di Semarang tahun 1912, kemudian juga berdiri pula Sekolah Kartini di beberapa tempat lain.<sup>1</sup>

Setelah Sekolah Kartini berdiri, muncul tokoh-tokoh pergerakan wanita yang kemudian bergabung dalam suatu organisasi. Organisasi pertama wanita yang menjadi pelopor adalah Putri Mardika dan dibentuk di Jakarta tahun 1912.<sup>2</sup> Selain di Jakarta, berdiri pula perkumpulan-perkumpulan wanita di setiap daerah termasuk di Yogyakarta. Perkumpulan pertama yang berdiri di Yogyakarta yaitu Sopo Tresno yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan tahun 1914. Pada tahun 1917 Sopo Tresno berubah nama menjadi Aisyiah.<sup>3</sup> Pada tahun 1928 berhasil diadakan Kongres Perempuan pertama yang berlangsung di Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 28-29.

<sup>2</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 412.

<sup>3</sup> Fauzie Ridjal, dkk, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 165-170.

Pada tahun 1942 masa penjajahan Belanda berakhir dan digantikan dengan penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, semua organisasi politik dan sosial telah dibubarkan termasuk organisasi wanita. Pembubaran tersebut karena tujuan dari organisasi sebelumnya tidak sesuai dengan kepentingan Jepang. Organisasi yang diinginkan Jepang yaitu yang dapat lebih mendekatkan Jepang dengan masyarakat Indonesia sekaligus untuk membantu dalam Perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang membentuk organisasi wanita baru yang sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang. Organisasi wanita bentukan Jepang yaitu *Jawa Hokokai Fujinkai* mendapat pelatihan berupa kepalangmerahan, baris-berbaris, menggunakan senjata, latihan bahaya udara, mengunjungi rumah sakit dan mengadakan dapur umum.<sup>4</sup>

Pada tahun 1945 berakhirilah kekuasaan Jepang atas Indonesia ditandai dengan pembacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno. *Jawa Hokokai Fujinkai* yang semula dibentuk oleh Jepang dibubarkan dan diganti dengan Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Berbagai gerakan wanita lahir dan berkembang di Yogyakarta, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Gerakan wanita yang berada di Yogyakarta kemudian semakin bertambah karena dijadikannya Yogyakarta sebagai ibukota Indonesia pada tahun 1946. Keterlibatan gerakan wanita di Yogyakarta pada perang kemerdekaan I tidak hanya membantu di garis belakang, namun turut serta berada di garis depan.

---

<sup>4</sup> Tashadi, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, (Jakarta: Depdikbud, 1991), hlm. 47.

## **B. Situasi Yogyakarta pada Awal Kemerdekaan**

### **1. Situasi Politik Yogyakarta Awal Kemerdekaan**

Tanggal 18 Agustus 1945 Sultan Hamengku Buwono IX memberikan selamat atas proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Widyodiningrat melalui telegram.<sup>5</sup> Pemberian ucapan selamat tersebut menandakan bahwa Yogyakarta bersedia bergabung dengan Republik Indonesia dan siap membantu. Segera dibentuklah berbagai alat kelengkapan negara untuk membantu pemerintah daerah Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X. Maklumat tersebut berisi tentang perubahan pemerintah Indonesia dari Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parleментар.<sup>6</sup> Perubahan kabinet diikuti dengan perubahan sistem kepartaian yaitu sistem multi partai. Namun, kaum wanita pada saat itu tidak begitu tertarik masuk dalam partai politik. Alasannya karena partai politik pada masa itu tidak begitu memperhatikan masalah kaum wanita.

### **2. Situasi Sosial Yogyakarta Awal Kemerdekaan**

Berita diproklamasikan kemerdekaan Indonesia diterima oleh kantor berita Domei Yogyakarta pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 12:00 WIB. Berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali wanita turut serta dalam perayaan serta penyebaran berita gembira tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para wanita bergerak aktif dalam pembuatan atribut kemerdekaan seperti lencana dan bendera.

---

<sup>5</sup> Ahmad Adaby Darban, dkk, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwana IX*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 32.

<sup>6</sup> Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 91.

Pada tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan amanat dan dinamakan Amanat 5 September 1945. Inti dari amanat tersebut adalah Yogyakarta menjadi bagian dan siap membantu Indonesia. Keluarnya Amanat 5 September 1945 mendapat reaksi dari masyarakat Yogyakarta. Pada bulan September masyarakat Yogyakarta mulai melakukan perebutan kekuasaan di berbagai tempat dari tangan Jepang. Berbagai perlawanan dan perebutan terjadi hingga kekuasaan benar-benar kembali ke tangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, bukan berarti perjuangan rakyat berakhir, karena Belanda kembali mendarat di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945 bersamaan dengan tentara Sekutu.

### 3. Situasi Ekonomi Yogyakarta Awal Kemerdekaan

Pengaturan ekonomi Indonesia pada saat awal kemerdekaan disebut dengan ekonomi darurat perang. Maksudnya yaitu perekonomian difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan Jepang maupun Belanda.<sup>7</sup> Pemerintah Yogyakarta dalam mengusahakan berjalannya perekonomian dengan melakukan penekanan biaya pengeluaran dan mencari pemasukan dana dengan segala cara.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah Yogyakarta untuk dapat menangani masalah perekonomian. Usaha yang dilakukan antara lain melakukan penghematan pengeluaran energi yang dilakukan Jawatan Listrik dan Gas Yogyakarta. Sedangkan untuk menambah pemasukan, pemerintah Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan perijinan tentang dimulainya

---

<sup>7</sup> Amrin Imran, dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 322.

kembali usaha produksi garam.<sup>8</sup> Pemerintah Yogyakarta juga berusaha untuk meringankan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan beras dengan sistem kupon<sup>9</sup> yaitu masyarakat yang mendapatkan kupon dapat menukarkan kuponnya dengan beras. Sultan Hamengku Buwono IX berusaha untuk membantu agar roda pemerintahan tetap berjalan. Bantuan yang diberikan berupa sumbangan dari kekayaannya untuk menjalankan roda pemerintahan dan menggaji para pegawai. Sultan Hamengku Buwono IX bahkan turut membiayai pasukan gerilya serta kebutuhan rakyat.

### **C. Kondisi Pergerakan Wanita Pasca Kemerdekaan di Yogyakarta**

Terdapat beberapa latar belakang berdirinya gerakan wanita di Indonesia, diantaranya yaitu dilatarbelakangi lingkungan masyarakat, pendidikan, kepemimpinan dan lingkungan keluarga.<sup>10</sup> Terdapat faktor lain terbentuknya organisasi wanita di Yogyakarta yaitu keadaan sosial Yogyakarta dan dukungan dari Presiden Soekarno serta Sultan Hamengku Buwono IX. Faktor-faktor tersebut kemudian menggerakkan wanita di Indonesia untuk membentuk suatu gerakan yang bertugas membantu pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di garis depan maupun di garis belakang. Terdapat 21 organisasi wanita yang lahir dan berada di Yogyakarta pasca kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>8</sup> Tim Barahmus, *Sejarah Perjuangan: Yogya Benteng Proklamasi*, (Jakarta: Badan Musyawarah Musea DIY Cabang Jakarta, 1985), hlm. 211.

<sup>9</sup> Isminah, wawancara di Yogyakarta, 10 Maret 2017.

<sup>10</sup> Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*, (Yogyakarta: Lembah Manah, 2010), hlm. 16.

### Organisasi Wanita di Yogyakarta Periode 1945-1947

No.	Nama Organisasi	Tahun Berdiri	Pemimpin Organisasi
1.	Wanita Negara Indonesia (Wani)	1945	Ny. Suwarni Pringgodigdo
2.	*Persatuan Wanita Indonesia (Perwani)	1945	Ny. Siti Sukaptinah
3.	**Laskar Putri Indonesia (LPI)	1945	Ny. Ontosinah Mangkubumi
4.	***Pemberontakan Rakyat Indonesia Putri (PRIP)	1945	Widajati
5.	Badan Penolong Keluarga Korban Perjuangan (BPKKP)	1945	BPH. Puroboyo dan Ibu Ruswo.
6.	****Wanita Pembantu Perjuangan (WAPP)	1946	Dokter Sulianti
7.	***Barisan Pemberontak Putri Mataram (BPPM)	1945	Widyawati
8.	***Perjuangan Putri Rakyat Indonesia (PPRI)	1945	Kistijah
9.	Aisyiah	1917	Siti Hajinah Mawardi
10.	***Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)	1945	Ny. Sri Mangunsarkoro
11.	*****Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI)	1946	Ny. Sri Mangunsarkoro
12.	***Laskar Wanita Indonesia	1945	Ny. S.Y. Arudji Kartawinata
13.	****Inspektorat Wanita	1946	Nj. Supijah
14.	*****Wanita Taman Siswa	1922	Ni Soerip
15.	Persatuan Kristen Wanita Indonesia (PKWI)	1946	Ibu Sutemas Sumilat

16.	Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)	1942	-
17.	Pesaudaraan Isteri Tentara (Persit)	1946	-
18.	Jalasenastri	1946	-
19.	*Pesatuan Pegawai Putri Indonesia (PPPI)	1945	Ny. Widajati Soeganda
20.	*****Barisan Buruh Wanita (BBW)	1946	S.K. Trimurti
21.	*****Pemuda Indonesia Maluku (PIM)	1946	Ny. Pupella

Sumber: Kowani, *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 1959).

\*Panitia Pembuatan Buku, *80 Tahun Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 110, 119.

\*\*Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*, (Yogyakarta: Lembah Manah, 2010), hlm. 16.

\*\*\**Kedaulatan Rakyat*, 1945.

\*\*\*\*Irna Hadi Soewito, *Lahirnya Kelaskaran Wanita dan Wirawati Catur Panca*, (Jakarta: REF Grafika, 1992), hlm. 7, 218

\*\*\*\*\*Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 10.

\*\*\*\*\* Badan Pusat Wanita Taman Siswa, *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Taman Siswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*, (Yogyakarta: Percetakan Offset Taman Siswa, 1992), hlm. 14.

\*\*\*\*\*Ipong Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 149.

\*\*\*\*\* Nana Nurliana, dkk, *Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 112.

Selama periode 1945-1947 terjadi Kongres Wanita Indonesia Selama empat kali. Pada tanggal 15-17 Desember 1945 di Klaten berlangsung kongres wanita pertama yang diadakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasil dari kongres tersebut adalah peleburan organisasi wanita antara Perwani dengan

Wani, yang menjadi Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia).<sup>11</sup> Pada tanggal 24-26 Februari 1946 diadakan Kongres Wanita yang kedua di Solo. Hasil dari kongres ini yaitu membentuk Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Pada tanggal 14-16 Juni 1946 diadakan Kongres Wanita di Madiun. Kongres tersebut memutuskan untuk membentuk Dewan Pimpinan dan Badan Pekerja serta berkantor di Yogyakarta.<sup>12</sup> Pada tanggal 14-16 Juli 1947 diadakan Kongres Wanita di Magelang. Keputusan Kongres Wanita di Magelang adalah menghapus Badan Pekerja yang terbentuk saat Kongres Wanita tahun 1946.<sup>13</sup>

Program Kowani setelah kemerdekaan yaitu membentuk pertahanan belakang dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Kongres menyatakan dukungan terhadap NKRI sebagai bentuk penolakan terhadap usaha Belanda yang ingin mengubah negara kesatuan menjadi negara federasi. Perselisihan yang semula terjadi antara organisasi wanita Islam, Katolik, Kristen juga organisasi sekuler lainnya dapat diredam dalam wadah Kongres Wanita.

#### **D. KETERLIBATAN GERAKAN WANITA DALAM PERANG KEMERDEKAAN I**

##### **1. Keterlibatan Gerakan Wanita di Garis Depan**

Pada awal kemerdekaan Indonesia, gerakan wanita tidak hanya membantu garis belakang, namun juga membantu di garis depan. Keterlibatan gerakan wanita

---

<sup>11</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), hlm. 96.

<sup>12</sup> Kowani, *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: tanpa nama penerbit, 1959), hlm. 39-40.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

di garis depan<sup>14</sup> antara lain di pertempuran. Terdapat anggota Laswi yang telah disiapkan untuk membantu di pertempuran, yaitu Ny. Gusti Johan (Ny. Lilik Kusmiati Sadikin), Nn. Susilowati (Ny. Jamil) serta Nn. Wiwik Atikah.<sup>15</sup> Keterlibatan yang kedua yaitu intelejen atau mata-mata. Organisasi PTPWI merupakan salah satu organisasi yang ikut serta bertarung dan menjadi intelejen. Keterlibatan yang ketiga yaitu mengirimkan senjata dan makanan ke garis depan<sup>16</sup>. Keterlibatan yang keempat yaitu sebagai kurir. Salah satu wanita yang menjadi kurir adalah Ibu Ruswo yang merupakan penanggung jawab dapur umum dan pengurus dari BPKKP.<sup>17</sup> Keterlibatan yang kelima yaitu sebagai rantai emas. Rantai emas merupakan wanita-wanita yang ditugaskan untuk memikat tentara Jepang maupun Belanda supaya mendapatkan informasi penting.<sup>18</sup>

## 2. Keterlibatan Gerakan Wanita di Garis Belakang

Keterlibatan yang pertama yaitu di dapur umum. Dapur umum secara harfiah memiliki makna tempat menyediakan makanan untuk umum.<sup>19</sup> Fungsi utama adanya dapur umum adalah tempat untuk mengolah makanan dan nantinya

---

<sup>14</sup> Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poewandari., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, 2000), hlm. 95.

<sup>15</sup> Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 77.

<sup>16</sup> Baha' Uddin, dkk, *Aisyiah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2010), hlm. 109.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>18</sup> Samdhy, wawancara di Yogyakarta, 8 Maret 2017.

<sup>19</sup> Tashadi, dkk, *op.cit.*, hlm. 96.

makanan tersebut akan dikirim ke garis depan. Keterlibatan yang kedua yaitu dalam Palang Merah. Para abdi dalem Kraton Yogyakarta juga ikut memberikan bantuan dana untuk PMI.<sup>20</sup> Palang Merah Indonesia pusat daerah Yogyakarta, tidak hanya mengurus masalah pengobatan bagi para pejuang tetapi juga mencarikan dana untuk dapur umum, urusan bekas pekerja dan para pengungsi.

Keterlibatan yang ketiga yaitu mencari dana melalui pengadaan lelang dan pasar. Salah satu organisasi yang mengadakan lelang adalah Perwani di Kementren Paku Alaman.<sup>21</sup> Keterlibatan yang keempat yaitu mengadakan Hubungan dengan Luar Negeri. Beberapa kali Kowani berhasil menghadiri konferensi di luar negeri yaitu *Interasian Relations Conference* di New Delhi<sup>22</sup> dan *All Indian Women Conference* di Madras.

Keterlibatan yang kelima yaitu memberikan penerangan.<sup>23</sup> Kegiatan memberikan penerangan bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah dan untuk meluruskan suatu kabar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Keterlibatan yang keenam yaitu mencarikan

---

<sup>20</sup> *Arsip Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 2269*. Berisi Surat dari KRT. Hanggawangsa Kepada Pengageng 1 KH. Prajurit Perihal Himbauan Kepada Abdi Dalem Kasultanan dan Pakualaman Termasuk Perangkat Desa dan Lurah untuk Memberikan Sokongan tiap Bulan untuk Fonds Kemerdekaan RI, Yogyakarta: Kapustakaan KHP Widya Budaya, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

<sup>21</sup> *Arsip Puro Paku Alaman VII No. 3699*. Berisi Surat Keputusan Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Perihal Pemberian Ijin Perwani untuk Mengadakan Lelang, Yogyakarta: Arsip Puro Paku Alaman.

<sup>22</sup> M. Ulfa Santosa, "Pergerakan Wanita Indonesia", dalam *Wanita* (No. 8, 1948), hlm. 6.

<sup>23</sup> Baha' uddin, dkk, *op.cit*, hlm. 89.

pakaian untuk pejuang, karena banyak pejuang yang pakaiannya sudah tidak layak akibat dari pertempuran. Keterlibatan yang ketujuh yaitu memberikan hiburan. Hiburan<sup>24</sup> yang diberikan organisasi wanita seperti Kowani ke garis depan yaitu majalah, makanan dan melalui siaran di radio.

### **E. Kesimpulan**

Situasi Yogyakarta pada awal kemerdekaan secara umum masih belum stabil baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Situasi politik di pemerintahan Yogyakarta pada awal kemerdekaan sedang berusaha melengkapi berbagai alat kelengkapan negara untuk memudahkan pemerintah di daerah. Situasi sosial Yogyakarta awal kemerdekaan belum kondusif dikarenakan adanya pertempuran-pertempuran antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang dan tentara Nica (*Nederlandsch Indie Civil Administratie*). Sedangkan situasi ekonomi Yogyakarta dinamakan ekonomi darurat perang karena segala dana difokuskan untuk perang.

Pertempuran-pertempuran yang terjadi pada awal kemerdekaan mendorong wanita untuk ikut serta dalam membantu mempertahankan kemerdekaan. Pergerakan wanita mulai bangkit dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Terdapat 21 organisasi wanita yang lahir dan berada di Yogyakarta pasca kemerdekaan Indonesia periode 1945-1947. Pada periode 1945-1947 organisasi wanita mengadakan Kongres Wanita di Klaten, Solo, Madiun dan Magelang.

Keterlibatan organisasi wanita dalam perang kemerdekaan I dapat dibagi menjadi dua yaitu keterlibatan di garis depan dan keterlibatan di garis belakang.

---

<sup>24</sup> Hoeroestiati Soebandrio, "Surat Terbuka", dalam *Revue Indonesia* (No. 23-24, 1946), hlm. 351.

Keterlibatan di garis depan yaitu dalam pertempuran, intelejen, mengirimkan senjata dan makanan ke garis depan, kurir serta sebagai rantai emas. Keterlibatan organisasi-organisasi wanita dalam membantu garis belakang antara lain mengadakan dapur umum, palang merah, mengadakan lelang dan pasar, mengadakan hubungan dengan luar negeri, memberikan penerangan, mencari pakaian serta memberikan hiburan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

*Arsip Puro Paku Alaman VII No. 3699.* Berisi Surat Keputusan Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII Perihal Pemberian Ijin Perwani untuk Mengadakan Lelang.

*Arsip Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 2269.* Berisi Surat dari KRT. Hanggawangsa Kepada Pengageng 1 KH. Prajurit Perihal Himbauaan Kepada Abdi Dalem Kasultanan dan Pakualaman Termasuk Perangkat Desa dan Lurah untuk Memberikan Sokongan tiap Bulan untuk Fonds Kemerdekaan RI.

### Buku

Ahmad Adaby Darban, dkk, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*, Jakarta: Depdikbud, 1998.

Amrin Imran, dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.

Badan Pusat Wanita Taman Siswa, *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Taman Siswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*, Yogyakarta: Percetakan Offset Taman Siswa, 1992.

Baha' Uddin, dkk, *Aisyiah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2010.

Djumarwan, *Laskar Putri Indonesia*, Yogyakarta: Lembah Manah, 2010.

Fauzie Ridjal, dkk, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.

- Ginandjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1995.
- Ipong Jazimah, S.K. *Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Irna Hadi Soewito, *Lahirnya Kelaskaran Wanita dan Wirawati Catur Panca*, Jakarta: REF Grafika, 1992
- Kowani, *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: tanpa nama penerbit, 1959.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto., *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda* , Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Nana Nurliana dkk, *Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950*, Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986.
- Ohorella, G.A, dkk, *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*, Jakarta: Depdikbud, 1992.
- Panitia Pembuatan Buku, *80 Tahun Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Rahayu Surtiati Hidayat, E. Kristi Poerwandaria, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, 2000.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1982.
- Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Tashadi, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Jakarta: Depdikbud, 1991.
- Tim Barahmus, *Sejarah Perjuangan: Yogya Benteng Proklamasi*, Jakarta: Badan Musyawarah Musea DIY Cabang Jakarta, 1985.

Yogyakarta, 14 Juni 2017

Pebimbing



Drs. Djumarwan

NIP. 19560101 198502 1 001

Reviewer



Danar Widiyanta, M.Hum

NIP. 19681010 199403 1 001